

**PENGARUH INFORMASI MELALUI MEDIA SOSIAL PEMERINTAH  
DAERAH TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM  
PROGRAM PEMBANGUNAN**

**(Skripsi)**

**Oleh**

**TIARA AMALIA RAHMAYANI**

**NPM 2416041101**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**UNIVERSITAS LAMPUNG**

**BANDAR LAMPUNG**

**2025**

## **DAFTAR ISI**

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>i</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	<b>1</b>
1.2 Rumusan Masalah.....	<b>9</b>
1.3 Tujuan Penulisan.....	<b>9</b>
1.4 Manfaat Penulisan.....	<b>10</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>11</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi di era digital telah membawa perubahan besar dalam hubungan antara masyarakat dan lembaga publik. Saat ini, internet dan media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, serta YouTube menjadi saluran utama dalam menyebarkan informasi dengan cepat dan luas. Kehadiran media sosial memungkinkan masyarakat tidak hanya menerima informasi, tetapi juga dapat memberikan tanggapan secara langsung dan real-time. Kondisi ini menunjukkan adanya pergeseran penting dari pola komunikasi tradisional menuju komunikasi interaktif berbasis digital. Sejalan dengan perkembangan tersebut, laporan APJII (2024) menunjukkan bahwa jumlah pengguna internet di Indonesia telah mencapai 221,56 juta jiwa atau sekitar 79,5% dari populasi, dan pada tahun 2025 meningkat menjadi 229,43 juta jiwa dengan penetrasi 80,66%. Data dari We Are Social/Hootsuite (2024) juga mencatat bahwa rata-rata masyarakat Indonesia menghabiskan lebih dari tiga jam setiap hari untuk menggunakan media sosial. Fakta ini menegaskan bahwa media sosial tidak lagi hanya berfungsi sebagai sarana hiburan, tetapi telah menjadi bagian penting dari aktivitas sehari-hari. Bagi pemerintah daerah, media sosial kini memiliki peran strategis untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program pembangunan. Hal ini sesuai dengan pendapat Nasution (2002) yang menjelaskan bahwa komunikasi pembangunan menekankan pada penggunaan strategi komunikasi yang efektif guna menyebarkan informasi, mengubah perilaku, serta mendorong masyarakat agar berpartisipasi dalam upaya kemajuan sosial dan ekonomi.

Pemerintah daerah kini semakin aktif memanfaatkan media sosial sebagai sarana strategis untuk mendekatkan diri dengan masyarakat. Melalui akun resmi di berbagai platform, pemerintah dapat menyampaikan informasi terkait program pembangunan, regulasi, layanan administrasi, hingga pengumuman penting secara cepat dan praktis. Kehadiran media sosial juga mendukung terwujudnya prinsip

good governance melalui transparansi, akuntabilitas, dan keterbukaan informasi publik. Dengan kata lain, media sosial telah menjadi bagian penting dari strategi komunikasi publik pemerintah. Sejalan dengan hal tersebut, Mannayong et al. (2024) menegaskan bahwa transformasi digital yang efektif melalui media sosial, forum daring, maupun aplikasi seluler tidak hanya memperluas jangkauan informasi pemerintah, tetapi juga memberi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat dan berkolaborasi dalam proses kebijakan.

Dalam konteks *e-government*, kualitas birokrasi dan kepemimpinan menjadi faktor penting dalam menentukan keberhasilan pelayanan publik. Katharina (2020) menegaskan bahwa reformasi birokrasi sangat ditentukan oleh kepemimpinan yang kuat. Sayangnya, kualitas pelayanan publik di Indonesia masih sering dianggap kurang optimal, terutama di daerah, akibat birokrasi yang belum berjalan efektif. Oleh karena itu, transformasi digital melalui penerapan *e-government* sangat dibutuhkan untuk menciptakan pelayanan yang cepat, transparan, dan adil. Pemanfaatan media sosial di tingkat daerah tidak hanya berkaitan dengan penyampaian informasi secara teknis, tetapi juga menuntut perubahan pola pikir birokrasi agar lebih responsif terhadap aspirasi masyarakat. Publik kini dapat dengan mudah menyampaikan kritik maupun tuntutan melalui kanal digital, sehingga respons pemerintah yang lambat berisiko menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat. Dengan demikian, media sosial tidak cukup hanya dijadikan sarana publikasi, tetapi harus diintegrasikan dengan sistem pelayanan publik yang partisipatif agar mampu mendorong keterlibatan masyarakat secara nyata.

transformasi digital di daerah menuntut adanya komitmen dari para pemimpin untuk mendorong keterbukaan informasi. Pemimpin yang adaptif terhadap perkembangan teknologi akan lebih mudah membangun komunikasi dengan masyarakat melalui gaya kepemimpinan yang inklusif. Dalam konteks pembangunan, kepemimpinan digital berperan penting untuk mempercepat penyampaian informasi, memperluas jangkauan sosialisasi program, serta membuka ruang dialog antara pemerintah dan masyarakat. Dengan cara ini, media sosial tidak hanya berfungsi sebagai sarana edukasi publik, tetapi juga sebagai instrumen kontrol sosial yang dapat memperkuat akuntabilitas pemerintah daerah.

Namun, tidak semua daerah memiliki kemampuan yang sama dalam mengoptimalkan media sosial. Perbedaan kualitas sumber daya manusia, infrastruktur teknologi, dan budaya birokrasi menjadi faktor yang memengaruhi keberhasilan implementasi *e-government* di tingkat lokal. Ada daerah yang berhasil menggunakan media sosial untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat, sementara daerah lain hanya menjadikannya sebagai saluran pengumuman tanpa interaksi berarti. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas media sosial sebagai instrumen *e-government* sangat bergantung pada sejauh mana pemerintah daerah mampu menjadikannya sebagai ruang komunikasi timbal balik yang sehat dengan warganya.

Partisipasi masyarakat merupakan fondasi penting dalam penyelenggaraan pembangunan yang efektif dan berkelanjutan. Partisipasi tidak hanya berarti kehadiran warga dalam forum, tetapi mencakup keterlibatan aktif mereka dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan, hingga evaluasi program pembangunan. Dalam konteks ini, keterbukaan informasi melalui media sosial diharapkan mampu meningkatkan kesadaran dan mendorong masyarakat untuk lebih terlibat. Namun, kenyataannya partisipasi masyarakat dalam pembangunan masih belum optimal. Banyak warga hanya berperan sebagai konsumen informasi tanpa benar-benar terlibat dalam diskusi publik, konsultasi kebijakan, atau pelaksanaan program. Tantangan utama yang sering muncul antara lain rendahnya literasi digital, kurangnya kesadaran mengenai pentingnya partisipasi, serta minimnya mekanisme umpan balik yang efektif dari pemerintah. Penelitian Fajrilla (2025) menegaskan bahwa meskipun media sosial cukup efektif dalam menyebarkan informasi, tingkat keterlibatan masyarakat tetap sangat dipengaruhi oleh motivasi dan kepedulian mereka terhadap isu publik. Dengan demikian, kualitas partisipasi masyarakat harus dilihat bukan hanya dari kuantitas kehadiran, tetapi dari sejauh mana mereka aktif menyampaikan ide, memberikan masukan, dan berkontribusi dalam pelaksanaan program pembangunan. Partisipasi masyarakat yang ideal bukan hanya diukur dari jumlah kehadiran dalam forum, tetapi dari sejauh mana warga aktif menyampaikan ide, memberi masukan, dan terlibat langsung dalam pelaksanaan program.

Kenyataannya, partisipasi masyarakat dalam pembangunan sering kali masih bersifat dangkal. Banyak warga hanya mengikuti informasi tanpa benar-benar memberikan kontribusi nyata dalam bentuk ide maupun tindakan. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara potensi partisipasi yang ditawarkan media sosial dengan realitas keterlibatan publik yang rendah. Situasi ini semakin rumit karena tidak semua kelompok masyarakat memiliki literasi digital yang memadai, sehingga sebagian tertinggal dalam proses transformasi digital. Selain itu, faktor kepercayaan publik terhadap pemerintah juga berpengaruh besar. Ketika masyarakat merasa pendapat mereka tidak direspons atau ditindaklanjuti, mereka cenderung pasif dan enggan terlibat kembali. Sebaliknya, jika pemerintah cepat memberikan respon yang jelas dan transparan, partisipasi masyarakat dapat meningkat secara signifikan. Oleh sebab itu, media sosial tidak seharusnya hanya digunakan sebagai sarana penyebaran informasi, melainkan harus difungsikan sebagai ruang dialog yang memberi makna nyata bahwa suara masyarakat dihargai dalam proses pembangunan.

Kondisi tersebut memperlihatkan adanya perbedaan antara penggunaan media sosial pemerintah daerah dengan keterlibatan nyata masyarakat. Kesenjangan ini menjadi alasan pentingnya penelitian untuk mengetahui sejauh mana informasi yang disampaikan melalui media sosial pemerintah daerah benar-benar mampu mendorong partisipasi warga. Pemerintah daerah perlu memahami efektivitas strategi komunikasi digital agar tidak berhenti pada penyebaran informasi, tetapi juga dapat mendorong tindakan nyata masyarakat. Umayasari dan Amantha (2025) menegaskan bahwa partisipasi publik akan meningkat apabila masyarakat merasa pendapatnya dihargai dan pemerintah cepat memberikan respon atas masukan yang disampaikan melalui platform digital.

Lebih jauh, kesenjangan antara ketersediaan informasi dan keterlibatan nyata masyarakat dalam pembangunan sering kali disebabkan oleh beberapa faktor mendasar. Pertama, pola komunikasi pemerintah daerah di media sosial masih cenderung bersifat satu arah (top-down), sehingga masyarakat hanya diposisikan sebagai penerima informasi, bukan mitra aktif. Kedua, mekanisme umpan balik yang ada sering kali tidak ditindaklanjuti secara transparan, sehingga menimbulkan persepsi bahwa partisipasi masyarakat tidak berpengaruh nyata pada pengambilan

keputusan. Ketiga, adanya perbedaan sosial-ekonomi dan literasi digital juga turut memengaruhi tingkat keterlibatan, di mana kelompok dengan keterbatasan akses teknologi lebih sering menjadi penonton pasif, sementara kelompok yang lebih melek digital cenderung lebih aktif dalam memberikan masukan.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa media sosial belum sepenuhnya berfungsi sebagai sarana pemberdayaan masyarakat. Jika pola komunikasi satu arah terus dibiarkan, media sosial berisiko hanya menjadi etalase pencitraan pemerintah tanpa menyediakan ruang dialog yang bermakna. Akibatnya, partisipasi masyarakat dalam pembangunan menjadi semu dan tidak memberikan kontribusi nyata bagi keberhasilan program. Dalam jangka panjang, hal ini bahkan dapat menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.

Oleh karena itu, diperlukan strategi komunikasi digital yang lebih inklusif dan interaktif. Masyarakat tidak hanya diajak untuk mengetahui program pembangunan, tetapi juga dilibatkan dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Dengan pendekatan tersebut, media sosial dapat menjadi instrumen penting untuk memperkuat demokrasi partisipatif di tingkat lokal. Kehadiran media sosial seharusnya tidak lagi dipahami sekadar sebagai alat publikasi, melainkan sebagai ruang bersama yang menjembatani kepentingan pemerintah dan masyarakat. Pemerintah daerah yang mampu mengoptimalkan peran media sosial akan lebih mudah membangun komunikasi transparan, meningkatkan partisipasi publik, serta memperkuat legitimasi kebijakan pembangunan di mata warga. Dengan demikian, penelitian mengenai hubungan antara media sosial pemerintah daerah dan partisipasi masyarakat memiliki urgensi baik secara akademis maupun praktis.

Penelitian terdahulu menunjukkan adanya hubungan erat antara motivasi, kinerja, dan akuntabilitas dalam mendorong partisipasi publik. Dalam konteks ini, informasi yang disampaikan melalui media sosial dapat berfungsi sebagai faktor pendorong (motivasi) bagi masyarakat untuk terlibat dalam pembangunan. Partisipasi masyarakat kemudian menjadi indikator kinerja pemerintah daerah dalam melibatkan publik, sedangkan akuntabilitas pemerintah menjadi penentu apakah partisipasi tersebut benar-benar bermakna.

Motivasi masyarakat untuk berpartisipasi tidak muncul secara otomatis, tetapi dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal. Dari sisi internal, motivasi cenderung tumbuh ketika pembangunan berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, atau infrastruktur. Dari sisi eksternal, motivasi sangat dipengaruhi oleh sejauh mana pemerintah daerah mampu menciptakan iklim komunikasi yang terbuka dan inklusif. Apabila masyarakat merasa bahwa suara mereka dihargai, maka mereka akan lebih terdorong untuk ikut serta secara aktif.

Kinerja pemerintah daerah juga berperan penting dalam mendorong partisipasi masyarakat. Informasi pembangunan yang disampaikan secara jelas, mudah dipahami, dan transparan akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Transparansi bukan sekadar membuka data, tetapi juga memastikan masyarakat mengetahui bagaimana proses pembangunan dijalankan, siapa yang terlibat, serta apa dampaknya. Pemahaman yang baik mengenai alur pembangunan akan memperkuat kepercayaan masyarakat dan mendorong keterlibatan yang lebih besar.

Selain kinerja, akuntabilitas pemerintah juga menjadi faktor krusial. Akuntabilitas yang tinggi membuat masyarakat yakin bahwa keterlibatan mereka bukan formalitas semata, melainkan benar-benar berpengaruh terhadap kebijakan. Sebaliknya, lemahnya akuntabilitas akan menurunkan partisipasi karena masyarakat merasa masukan mereka tidak membawa perubahan nyata. Dengan demikian, motivasi, kinerja, dan akuntabilitas merupakan tiga komponen yang saling terkait dalam membangun partisipasi masyarakat. Media sosial dapat menjadi katalis yang memperkuat hubungan ketiganya, asalkan pemerintah daerah mampu menggunakannya secara efektif sebagai sarana interaksi dan pengawasan publik.

Fenomena rendahnya partisipasi masyarakat juga dipengaruhi oleh faktor sosial dan budaya. Misalnya, masyarakat adat di Papua, seperti di Kabupaten Tolikara, memiliki karakteristik sosial yang homogen dan tingkat ketergantungan tinggi pada pemerintah. Hal ini membuat partisipasi mereka dalam pembangunan cenderung pasif dan terbatas. Hambatan lain yang muncul adalah ketidakseimbangan informasi, budaya patron-klien, serta rendahnya kapasitas pendidikan (Sitorus et

al., 2023). Faktor-faktor tersebut menunjukkan bahwa karakteristik sosial budaya berperan penting dalam menentukan tingkat keterlibatan masyarakat. Di sisi lain, terdapat contoh praktik baik pemanfaatan media sosial oleh pemerintah daerah. Pemerintah Kota Surabaya secara aktif menggunakan Instagram dan Twitter untuk menyebarkan informasi mengenai program kebersihan, kesehatan, dan pendidikan. Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui akun resmi “@jabarprovgoiD” juga konsisten membagikan informasi pembangunan sekaligus membuka ruang diskusi publik. Meskipun demikian, tingkat keterlibatan masyarakat masih bervariasi. Sebagian warga merespons dengan antusias, sementara yang lain hanya menjadi penonton pasif. Fenomena ini memperlihatkan bahwa konteks sosial dan budaya di setiap daerah sangat memengaruhi partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, strategi komunikasi pemerintah daerah melalui media sosial harus disesuaikan dengan kondisi sosial budaya setempat agar pesan pembangunan lebih mudah diterima dan direspons.

Dari sisi akademis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian mengenai komunikasi politik, tata kelola pemerintahan, serta partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Penelitian ini juga berpotensi memberikan kontribusi teoritis untuk mengisi celah literatur yang masih terbatas terkait efektivitas media sosial pemerintah daerah dalam mendorong partisipasi publik. Sementara itu, dari sisi praktis, penelitian ini dapat memberikan rekomendasi nyata bagi pemerintah daerah dalam memanfaatkan media sosial secara lebih efektif. Dengan strategi komunikasi yang tepat, media sosial dapat menjadi sarana untuk meningkatkan kesadaran, keterlibatan, dan kolaborasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Hal ini sejalan dengan prinsip *good governance*, di mana transparansi dan partisipasi publik menjadi aspek utama.

Dari sisi praktis, penelitian ini juga dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam memanfaatkan media sosial. Informasi yang disebarkan seharusnya tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga mampu mendorong masyarakat untuk terlibat aktif dalam program pembangunan. Apabila penggunaan media sosial dioptimalkan, akan tercipta komunikasi dua arah yang lebih efektif antara pemerintah dan masyarakat. Hal ini tidak hanya memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah, tetapi juga mendukung terwujudnya pembangunan yang

partisipatif, transparan, dan berkelanjutan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi aplikatif untuk meningkatkan kualitas interaksi antara pemerintah daerah dan masyarakat melalui media sosial. Oleh karena itu, penelitian ini relevan baik secara teoritis untuk pengembangan ilmu administrasi publik maupun secara praktis bagi peningkatan strategi komunikasi pemerintah daerah di era digital.

Dengan mempertimbangkan dinamika tersebut, jelas bahwa media sosial memiliki potensi besar sekaligus tantangan dalam mendorong partisipasi masyarakat. Di satu sisi, media sosial mampu memperluas akses informasi, membuka ruang diskusi, dan memperkuat transparansi. Namun di sisi lain, tanpa strategi komunikasi yang tepat, media sosial berisiko hanya menjadi saluran formalitas yang tidak meningkatkan keterlibatan nyata. Inilah yang menjadikan penelitian ini penting untuk dilakukan, guna memahami sejauh mana informasi yang disampaikan melalui media sosial pemerintah daerah benar-benar mampu memengaruhi partisipasi masyarakat dalam program pembangunan.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa media sosial memiliki potensi besar sebagai sarana komunikasi publik pemerintah daerah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Namun, masih terdapat kesenjangan antara banyaknya informasi yang disebarkan dengan rendahnya keterlibatan nyata masyarakat. Penelitian terdahulu tentang motivasi, kinerja, dan akuntabilitas juga menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan informasi, tetapi juga oleh sejauh mana informasi tersebut mampu memotivasi masyarakat untuk berpartisipasi aktif.

Oleh karena itu, penelitian mengenai pengaruh informasi melalui media sosial pemerintah daerah terhadap partisipasi masyarakat dalam program pembangunan menjadi sangat relevan untuk dilakukan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis bagi pengembangan ilmu administrasi publik, sekaligus manfaat praktis bagi pemerintah daerah dalam merancang strategi komunikasi digital yang lebih efektif, dialogis, dan berkelanjutan. Dengan optimalisasi media sosial, pemerintah daerah dapat menciptakan lingkungan

pembangunan yang partisipatif, transparan, dan inklusif, sehingga sejalan dengan prinsip *good governance*.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, dapat dipahami bahwa pemanfaatan media sosial oleh pemerintah daerah memiliki potensi besar untuk mendorong keterlibatan masyarakat dalam pembangunan. Namun, pada kenyataannya masih terdapat kesenjangan antara banyaknya informasi yang disebarkan dengan rendahnya partisipasi masyarakat yang benar-benar aktif. Kondisi ini memunculkan sejumlah persoalan yang menarik untuk diteliti lebih lanjut.

Oleh karena itu, rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk pemanfaatan media sosial oleh pemerintah daerah dalam menyampaikan informasi mengenai program pembangunan kepada masyarakat?
2. Sejauh mana informasi yang disampaikan melalui media sosial pemerintah daerah berpengaruh terhadap tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah?
3. Faktor-faktor apa saja yang mendukung dan sekaligus menghambat efektivitas media sosial pemerintah daerah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Selaras dengan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran yang lebih mendalam mengenai hubungan antara pemanfaatan media sosial oleh pemerintah daerah dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Secara lebih rinci, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menjelaskan bagaimana pemerintah daerah memanfaatkan media sosial sebagai sarana komunikasi publik dalam menyampaikan informasi terkait program pembangunan, regulasi, maupun layanan publik.

2. Menganalisis sejauh mana informasi yang diperoleh masyarakat melalui media sosial pemerintah daerah dapat memengaruhi kesadaran, motivasi, serta keterlibatan masyarakat dalam program pembangunan.
3. Mengidentifikasi berbagai faktor pendukung maupun hambatan yang memengaruhi efektivitas media sosial pemerintah daerah, baik dari aspek birokrasi, infrastruktur teknologi, literasi digital masyarakat, maupun tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dari sisi teoritis maupun praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah ilmu administrasi publik, khususnya dalam kajian mengenai komunikasi publik, *e-government*, serta partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk mengkaji topik serupa, sehingga dapat memperluas literatur mengenai efektivitas media sosial sebagai instrumen komunikasi pemerintah daerah.

2. Manfaat Praktis

Dari sisi praktis, penelitian ini dapat memberikan masukan bagi pemerintah daerah dalam mengoptimalkan penggunaan media sosial sebagai sarana komunikasi yang lebih interaktif, transparan, dan partisipatif. Hasil penelitian ini diharapkan mampu membantu pemerintah daerah dalam merumuskan strategi komunikasi digital yang tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga mendorong masyarakat untuk terlibat aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi pembangunan. Dengan demikian, penelitian ini dapat berkontribusi dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah daerah serta mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang sesuai dengan prinsip *good governance*.

## DAFTAR PUSTAKA

- Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. (2024, 7 Februari). APJII: Jumlah pengguna internet Indonesia tembus 221 juta orang. Diakses pada [tanggal akses], dari [https://apjii.or.id/berita/d/apjii-jumlah-pengguna-internet-indonesia-tembus-221-juta-orang?utm\\_source](https://apjii.or.id/berita/d/apjii-jumlah-pengguna-internet-indonesia-tembus-221-juta-orang?utm_source)
- Fajrilla, C. (2025). Peningkatan partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan melalui sosialisasi media sosial. *Jurnal Inovasi Sektor Publik*, 5(1), 30–38. <https://doi.org/10.58258/jisip.v7i1.4502>
- Katharina, R. (Ed.). (2020). *Pelayanan publik dan pemerintahan digital Indonesia*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Mannayong, J., Rizal, M., Herling, & Faisal, M. (2024). Transformasi digital dan partisipasi masyarakat: Mewujudkan keterlibatan publik yang lebih aktif. *Jurnal Administrasi Publik*, 20(1), 51–72. <https://doi.org/10.52316/jap.v20i1.260>
- Nasution, Z. (2002). *Komunikasi pembangunan: Pengenalan teori dan penerapannya*. PT Raja Grafindo Persada.
- Riyanto, A. D. (2024, 21 Februari). Hootsuite (We are Social): Data Digital Indonesia 2024. Diakses pada [tanggal Anda mengakses], dari <https://andi.link/hootsuite-we-are-social-data-digital-indonesia-2024/>
- Sitorus, Y. L. M., Usman, S., & Yanthy, N. O. (2023). *Perencanaan pembangunan partisipatif pada penduduk asli*. CV Mega Press Nusantara.
- Umayasari, U., & Amantha, G. K. (2025). Partisipasi warga melalui media digital dan implikasinya terhadap akuntabilitas serta perumusan kebijakan pemerintah daerah di Lampung. *Journal of Administration, Governance, and Political Issues*, 2(1), 109–124. <https://journal.pubmedia.id/index.php/jagpi/index>